

# LAPORAN KINERJA (LKj)

---

**BAPPEDA  
KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Maksud dan Tujuan .....	2
1.3    Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.4    Isu Strategis .....	3
1.5    Komposisi SDM Organisasi .....	3
<b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	6
2.1    Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai .....	6
2.1.1    Visi dan Misi .....	5
2.1.2    Program Untuk Pencapaian Sasaran .....	10
2.2    Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	11
2.3    Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	12
2.4    Rencana Anggaran Tahun 2017 .....	13
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	20
3.1    Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2    Capaian Indikator Kinerja 2017.....	22
3.3    Perbandingan Capaian Kinerja .....	22
3.4    Realisasi Anggaran .....	31
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin .....	3
Tabel 1.2	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan .....	4
Tabel 1.3	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural .....	5
Tabel 2.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	9
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD BAPPEDA .....	10
Tabel 2.3	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017 .....	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 .....	12
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama .....	13
Tabel 2.6	Rencana Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2017.....	14
Tabel 2.7	Alokasi persasaran Tahun Anggaran 2017 .....	14
Tabel 3.1	Pencapaian Indikator Tahun 2017 .....	21
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel 3.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan .....	22
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan .....	24
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 Peningkatan Kecamatan yang Menjadi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh .....	27
Tabel 3.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Musrenbang .....	29
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 .....	33

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai Tahun 2017 ini dapat disusun dan diselesaikan. LKj Bappeda Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjelaskan bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun.

Selanjutnya pelaksanaan penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2017 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, dijabarkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam tahun 2017 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2017.

Penyusunan LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja. Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Dalam LKj Bappeda Kabupaten Sinjai ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

Sinjai, 01 Februari 2018

 Kepala BAPPEDA  
  
Drs. Andi Ilham Abubakar, MH  
NIP 19720512 199202 1 001

Pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Dalam proses perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, tetap mengutamakan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dengan membuka peluang yang sangat lebar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten; meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi; meningkatkan sistem pendataan/informasi/statistik; membangun sumber daya manusia yang professional, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, kebijakan dan program program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai ditetapkan untuk mendorong dan memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Adapun indikator sasaran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel;
3. Meningkatnya efektivitas program prioritas pembangunan.

Setiap sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan. Pada tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai melaksanakan 13 program dengan 55 kegiatan. Adapun rencana tingkat capaian (target) rata-rata adalah sebesar 99,03%, dan realisasi rata-rata 94,40%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 96,63%.

Mayoritas IKU kinerjanya sudah mencapai 100% untuk Tahun 2017, Sedangkan empat indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu Jumlah dan jenis kendaraan dinas/opersional yang disediakan jasa perizinan, Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan makro, Dokumen evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan dinamika pembangunan semakin cepat dan tuntutan kebutuhan publik semakin besar, sehingga perlu lebih mengoptimalkan sistem perencanaan yang akuntabel dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan yang sistematis diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur yang terlibat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan publik serta memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas kedua dasar tersebut (pertimbangan filosofis dan yuridis), maka agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan terstruktur perlu diawali dengan adanya perencanaan yang selaras antara daerah, provinsi dan pusat. Pada bidang perencanaan di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai terus berupaya untuk melaksanakan program/kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2017 berbagai program yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam kegiatan, serta indikator kegiatan (input, output, outcome) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif, akuntabel, dan berkesinambungan.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program/kegiatan, maka telah dilakukan proses penilaian (pengukuran) kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari pelaksanaan kewajiban tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis.

### 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) Tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan kinerja (LKj) ini pada dasarnya disusun tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana dasar hukum

penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional guna memenuhi dan melayani kebutuhan publik. Namun sekaligus untuk bahan evaluasi internal (self-assesment) bagi Bappeda Kabupaten Sinjai sendiri guna perbaikan di masa mendatang. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada bidang perencanaan di daerah guna melakukan penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Sinjai.

### 1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai adalah lembaga teknis daerah Lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

#### Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Program dan keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Infrastruktur dan ekonomi:
  - a. Sub Bidang ekonomi
  - b. Sub Bidang Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi
  - c. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan
4. Bidang Sosial dan Pemerintahan:
  - a. Sub Bidang sosial
  - b. Sub Bidang Pemerintahan
  - c. Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

5. Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
  - a. Sub Bidang Perencanaan Makro
  - b. Sub Bidang Data dan Evaluasi
  - c. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja Tahun 2017 adalah:

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat perencana Bappeda.
2. Sumber daya manusia yang terbatas dan belum sepenuhnya
3. Masih rendahnya kualitas ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Kurangnya *partnership* dengan tenaga Perencana eksternal.
5. Kabupaten Sinjai belum termaksud kawasan strategis yang cepat tumbuh
6. Perlunya penguatan kelembagaan tenaga perencana
7. Kurangnya tingkat efektivitas pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja pembangunan Daerah.
8. Perlunya peningkatkan integrasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan Daerah.
9. Masih kurangnya hasil dokumen perencanaan pembangunan yang mengakomodasi partisipasi berbagai *stakeholder*.

#### 1.5 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Adapun komposisi personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin**

GOLONGAN / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG Perencanaan makro, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		BIDANG Sosial dan Pemerintahan		BIDANG Infrastruktur dan Ekonomi		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

II/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
III/a	3	-	1	-	-	-	-	-	3	1	4
III/b	1	1	-	-	-	-	2	-	3	1	4
III/c	1	-	-	3	-	1	2	1	3	5	8
III/d	1	-	1	-	-	1	-	1	1	3	4
IV/a	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Honorer	4	4	2	2	2	2	1	4	9	12	21
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>		<b>9</b>		<b>7</b>		<b>11</b>		<b>46</b>		

Tabel 1.2  
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

PENDIDIKAN	SEKRETARIAT		BIDANG Perencanaan makro, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		BIDANG Sosial dan Pemerintahan		BIDANG Infrastruktur dan Ekonomi		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S 2	1	-	-	-	-	2	1	2	2	4	6
S 1	3	1	2	3	-	1	4	-	9	5	14
SMA	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>		<b>5</b>		<b>3</b>		<b>7</b>		<b>24</b>		

Tabel 1.3  
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural

Eselon	SEKRETARIAT		BIDANG Perencanaan makro, Pembiayaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		BIDANG Sosial dan Pemerintahan		BIDANG Infrastruktur dan Ekonomi		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Eselon II/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Eselon III/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Eselon III/b	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	3
Eselon IV/a	1	1	-	3	-	2	2	1	3	7	10
<b>JUMLAH</b>	3	1	1	3	-	3	2	2	6	9	14
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>		<b>4</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>14</b>		

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

#### 2.1.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 5 Tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan Tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

#### VISI :

Bappeda Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Lembaga teknis daerah Kabupaten Sinjai, dalam menetapkan Visinya tetap tentu harus mengacu pada Visi Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Memperhatikan Visi Kabupaten Sinjai tersebut maka visi BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2013 - 2018 adalah :

***“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Sinergis, Partisipatif dan Akuntabel mendukung Akselerasi Pembangunan ”***

Adapun Maknanya Adalah :

**Terwujudnya** : adalah merealisasikan rencana kegiatan menjadi kenyataan

**Perencanaan** : adalah suatu proses untuk mrentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan – tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya .

**Pembangunan** : proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik melalui upaya secara terencana berdasarkan norma – norma tertentu yang ***Adil bagi segala umur, perempuan dan Laki - Laki.***

**Berkualitas** : adalah menghasilkan capaian tujuan kegiatan yang adapat terukur dengan parameter yang ditetapkan

**Sinergis** : adalah perencanaan yang mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai

**Partisipatif** : adalah masyarakat pro aktif dalam turut menentukan arah dan tujuan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

**Akuntabel** : adalah dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan per undang – undangan yang berlaku, baik sumber inputnya, prosesnya maupun peruntukan manfaatnya.

**Akselerasi Pembangunan** : Mampu berperan sebagai pendorong dan penggerak dalam percepatan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang maju berkemakmuran dan berkualitas.

## MISI

Agar visi dapat diwujudkan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Adapun rumusan Misi BAPPEDA Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

### **Meningkatkan kapasitas aparat SDM perencana.**

Penetapan misi ini mengacu kepada peran BAPPEDA dalam rangka pengembangan sumberdaya yang tersedia di Bappeda Kabupaten Sinjai Pada masa mendatang tuntutan akan kualitas SDM aparatur perencana semakin tinggi, seiring dengan semakin berkembangnya perencanaan itu sendiri ditinjau dari sisi keilmuan dan teknologi, perkembangan regulasi, serta tuntutan partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan.

### **Meningkatkan Integrasi,koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi Rencana pembangunan daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.**

Meningkatkan integrasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi rencana pembangunan Daerah, merupakan upaya meningkatkan nilai optimum dari setiap pemanfaatan sumber daya pembangunan yang digunakan baik secara makro maupun mikro. Di samping itu pengintegrasian dan pengkoordinasian juga diarahkan untuk mensinkronkan tujuan nasional dan regional dan lokal dalam pembangunan ***secara sinergi secara adil dan merata disemua golongan*** sehingga dapat diformulasikan berbagai rencana efektif, selain itu meningkatkan kualitas ketersediaan data dan Informasi rencana pembangunan Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan, merupakan langkah strategis yang dilaksanakan agar rencana pembangunan Daerah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan formal tetapi dilandasi kebutuhan material dalam rangka mengidentifikasi, masalah dasar dalam pembangunan Daerah, potensi yang tersedia sekaligus alternatif kebijakan dan formulasi program serta kegiatan dan penganggaran pelayanan umum yang ditetapkan

**Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang mengakomodir partisipasi berbagai stakeholder.**

Merupakan upaya untuk mengcover semua perencanaan atau usulan yang datang dari masyarakat , dan dengan cara ini juga semua stakeholder dapat turut berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan partisipatif.

**TUJUAN**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 Tahun adalah, sebagai berikut :

- Misi Pertama** : Meningkatkan Kapasitas Aparat SDM Perencana.  
Tujuannya : Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparat Perencana.
- Misi Kedua** : Meningkatkan Integrasi, Koordinasi Singkronisasi dan Sinergi Rencana Pembangunan serta Pengelolaan Ketersediaan Data dan Informasi Rencana Pembangunan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.  
Tujuannya : Kualitas Dokumen Perencanaan Tiga Terbaik Propinsi. Peningkatan dan Percepatan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.
- Misi Ketiga** : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Mengakomodir Partisipasi berbagai Stakeholder.  
Tujuannya : Peningkatan Partisipasi Aktif dalam Implementasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

**SASARAN**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran**

<b>VISI : TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS, SINERGIS, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL MENDUKUNG AKSELERASI PEMBANGUNAN.</b>		
<b>MISI I : Meningkatkan Integrasi, Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergi Rencana Pembangunan serta pengelolaan ketersediaan data dan informasi rencana pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
Kualitas Dokumen Perencanaan Tiga Terbaik Propinsi.	Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.	Persentase ketersediaan data perencanaan kabupaten dalam aplikasi SIPD
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan.	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD
		Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dalam dokumen RKPD
		Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya dalam dokumen RKPD
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
Peningkatan dan percepatan kawasan strategi cepat tumbuh.	Meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh.	Jumlah Kecamatan yang menjadi kawasan strategi cepat tumbuh
<b>MISI II : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Mengakomodir Partisipasi berbagai Stakeholder.</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
Peningkatan partisipasi aktif dalam implementasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.	Persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam APBD

**Tabel 2.2**  
**Sasaran dan Indikator Sasaran SKPD BAPPEDA**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan data perencanaan Kabupaten dalam aplikasi SIPD	%	Belum menggunakan Aplikasi	65%
2.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	85%	-
		Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Dokumen RKPD	%	70%	80%
		Persentase Pemanfaatan dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam Dokumen RKPD	%	70%	80%
3.	Meningkatnya Kecamatan yang menjadi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh	Kecamatan yang menjadi kawasan strategi cepat tumbuh	Kecamatan	Belum ada	2
4.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	Persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam APBD	%	30%	80%

#### 2.1.2 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program - program. Adapun program - program untuk mendukung masing -

masing sasaran Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017**

Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan Pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Data/informasi.</li> <li>• Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah</li> </ul>
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Kerjasama Pembangunan.</li> <li>• Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.</li> <li>• Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak (PUG)</li> </ul>
Meningkatnya Kecamatan yang menjadi kawasan strategi Cepat Tumbuh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh.</li> <li>• Program Perencanaan pengembangn kota-kota menengah dan besar.</li> <li>• Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> </ul>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan musrenbang.	Program perencanaan pembangunan daerah

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA SKPD, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2017, IKU dan APBD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Meningkatnya kualitas data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan data perencanaan Kabupaten dalam aplikasi SIPD	%	65 %
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan.	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	-
	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Dokumen RKPD	%	80%
	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam Dokumen RKPD	%	80%
Meningkatnya Kecamatan yang menjadi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh	Kecamatan yang menjadi kawasan strategi cepat tumbuh	Kecamatan	2
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Musrenbang	Persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam APBD	%	80%

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan data perencanaan kabupaten dalam aplikasi SIPD	%	Jumlah elemen Data yang disediakan dengan dibagi dengan jumlah elemen data yang dipergunakan dalam dokumen perencanaan ) x 100	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	(Jumlah Program di RKPD dibagi Jumlah Program di RPJMD) X 100	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Peningkatan Kecamatan yang menjadi kawasan strategi Cepat Tumbuh	Meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh	Kecamatan	( Jumlah Kecamatan dibagi Jumlah Kecamatan yang masuk kategori Kawasan Cepat Tumbuh ) X 100	Bidang Infrastruktur dan Ekonomi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam APBD	%	Jumlah Usulan yang masuk dengan jumlah usulan yang masuk dalam APBD ) X 100	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

#### 2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 7.266.434.602 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana

anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Rencana Belanja**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah TA. 2017**

No.	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.477.262.902	94,58
2	Belanja Langsung	5.789.171.700	94,61
<b>Jumlah</b>		<b>7.266.434.602</b>	<b>94,59</b>

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program - program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kualitas data dan Informasi perencanaan pembangunan.	Persentase ketersediaan data perencanaan Kabupaten dalam aplikasi SIPD	117.136.000,-	2,45
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan.	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD	2.447.002.600,-	42,27
	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam dokumen RKPD	77.288.000,-	1,34
	Persentase pemanfaatan dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan dalam Dokumen RKPD	995.544.100,-	17,20
Meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh	Kecamatan yang menjadi kawasan strategi cepat tumbuh	942.171.600,-	16,28

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam APBD	376.068.000,-	6,50

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran pertama Sasaran Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebesar Rp. 117.136.000,- terdiri dari kegiatan Penyusunan Dokumen SIPD dengan anggaran Rp. 87.476.000 dan telah realisasi sebesar Rp. 78.560.000,- atau persentase sebesar 89,81%. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen SIPD dan profil daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebanyak 2 dokumen dan kegiatan Pengelolaan Website Hasil dari kegiatan ini untuk Updating layanan informasi kebutuhan data- data perencanaan berbasis internet dengan anggaran Rp. 29.660.000,00 dan terealisasi 100%.

Selanjutnya Sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan didukung oleh beberapa program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.519.834.700,- didukung oleh kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai menargetkan 2 (dua) dokumen yaitu Dokumen RKPD Tahun 2018 dan Dokumen RKPD perubahan Tahun 2017. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Dengan realisasi keuangan sebesar Rp 183.359.000 dengan persentase 97,61%., Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Hasil dari kegiatan ini Tersedianya dokumen hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja pemerintah dengan target kineija sebanyak 3 dokumen, selain itu Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen evaluasi RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2017, dokumen monitoring pembangunan Tahun 2017, dan Draft dokumen evaluasi pembangunan pedesaan, sedangkan Sasaran Kegiatan adalah semua SKPD, dengan anggaran Rp. 200.596.000,00 dan realisasi Rp 191.296.119,00 dengan porsentase 95,36%. Kegiatan Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Aplikasi Sistem Managemen Perencanaan Daerah untuk meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan yang ada di Kabupaten agar bersinergi mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, kecamatan, sampai Kabupaten. Target pada kegiatan ini adalah 1 (tiga) SIM yaitu : SIM Monev.yang telah mencapai target. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 242.202.000.00 dengan realisasi 96.75%., Fasilitasi program Pengarusutamaan Gender (PUG) Kegiatan ini bertujuan terwujudnya kualitas Perencanaan dan Penanggulangan Responsif Gender (PPRG).

Keluarannya adalah adanya Laporan Data Terpilah PUG & PA, Evaluasi PPRG & Usulan Musrenbang Anak & Perempuan Tahun 2017. Sehingga menghasilkan Tercapainya Perencanaan & Penganggaran yang Responsif Gender di Setiap SKPD 2017 Jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 168.272.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 168.231.811,00 atau sebesar 99,98%. Dampaknya memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender/anak disegala bidang. Koordinasi Evaluasi Perencanaan Ruang Daerah (KEPRD) Kabupaten Sinjai Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dengan semua pelaksanaan penataan ruang daerah di Kabupaten melalui lembaga BKPRD. Dengan hasil Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 251.199.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 93,81% atau sebesar Rp. 235.648.315,-, Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan, Kegiatan ini dilaksanakan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Th 2016 Tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 171.475.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 92,11% atau sebesar Rp. 157.939.000,00. Target dari kegiatan ini adalah 1 dokumen, Review RTRW Provinsi Substansi Kehutanan Kegiatan ini dilaksanakan karena adanya usulan Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP Sulsel. Oleh karenanya Diharapkan Pemerintah Daerah Pengusul Revisi Kawasan Hutan siap memfasilitasi kegiatan Review RTRWP Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan yang dilaksnakan Tahun 2017, sedangkan hasil dari kegiatan ini laporan kajian revisi kawasan hutan dalam review RTRWP Sulawesi Selatan di Kabupaten Sinjai. Anggaran ini sebesar Rp. 519.497.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar 82,48% atau sebesar Rp. 428.499.600,00. Target dari kegiatan ini adalah 1 laporan. Updating Implementasi Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Program PPSP Keluaran dari kegiatan ini adalah Review Dokumen Perencanaan Bidang Sanitasi Permukiman, sedangkan hasil dari kegiatan ini menghasilkan Dokumen rujukan perencanaan strategis pembangunan sanitasi permukiman dalam jangka menengah (5 Tahunan). Jumlah anggaran sebesar Rp. 155.296.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.143.775.193,00 atau sebesar 92,58%. Sasaran Kegiatan ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fasilitas Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III). Hasil dari kegiatan ini Dokumen perencanaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi Tahun 2018 sebanyak 1 dokumen, sedang hasil dari kegiatan ini tersedianya Dokumen Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Pedesaan Berbasis

Masyarakat Tahun 2018. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 158.306.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.327.885,-. Atau dengan persentase sebesar 88,64%. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Capaian Kegiatan ini adalah Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi, keluaran Dokumen Potensi Pengembangan Ekonomi kabupaten Sinjai Tahun 2017 dan hasil Terinformasikannya Potensi Ekonomi Secara Terpadu dan Terencana. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 77.288.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 72.703.000,-. Fasilitasi Revisi Dokumen Perencanaan Kegiatan ini bertujuan untuk merevisi RPJPD Tahun 2005 - 2020, Revisi RPJMD Tahun 2013 - 2018, dan Revisi Renstra Tahun 2013 - 2018 yang disebabkan oleh adanya OPD baru, target dari kegiatan ini adalah 2 Dokumen / 2 Perda. Dengan anggaran Rp. 414.935.000,00 dengan realisasi keuangan 97,96%. Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan sinkronisasi antara pembangunan daerah, pembangunan provinsi dan pembangunan pusat, dengan anggaran Rp. 145.647.000,00 dengan realisasi 70,70%. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan Keluaran dari kegiatan ini agar Koordinasi perencanaan SKPD Bidang sosial dan pemerintahan, proposal APBN, proposal DAK. Kegiatan ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 183.840.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 183.782.467,- atau dengan persentase sebesar 99,97%. Fasilitasi penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2017 Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk terselenggaranya program Kabupaten/Kota sehat Tahun 2017, dampak dari pelaksanaan kegiatan ini terwujudnya suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat sinjai. Kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar karena Kabupaten Sinjai ditetapkan sebagai Tim Pembina terbaik dengan Kategori Padapa. Kegiatan ini memiliki Aokasi anggaran Rp. Rp.291.980.100,- dan realisasi sebesar Rp. 291.205.572,- atau 99,73%. Fasilitasi Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Dokumen acuan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang mampu dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan sesuai dengan kewenangan, sumber daya, dengan semangat kebersamaan yang diwujudkan melalui proses partisipatif, akuntabel, dan didasarkan pada informasi yang realistis. Manfaat dari penyusunan dokumen ini adalah Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) dan laporan kineija tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), pemetaan sebaran penduduk miskin Tahun 2017. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 198.046.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 190.423.856,- dengan persentase sebesar 96,15%. Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa Hasil dari kegiatan ini adalah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa Terarah & Terpadu, Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Kecamatan dan Desa. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 84.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.028.453,- dengan persentase sebesar 98,04%. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD-TB) Hasil dari kegiatan ini adalah adanya Sinergitas Pencapaian Target Pengendalian Program TB menuju Eliminasi TB di Kabupaten Sinjai, adapun keluaran dari kegiatan ini adanya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengendalian Tuberkulosis (TB) 2016 -2020 yang ditargetkan 1 dokumen. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 68.716.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.681.650,- dengan persentase sebesar 92,67%.

Untuk mendukung sasaran peningkatan kecamatan yang menjadi kawasan strategi cepat tumbuh yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain, kegiatan Koordinasi bidang SDA dan prasarana wilayah. Keluaran kegiatan adalah waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang SDA dan praswil dengan hasil kegiatan terwujudnya koordinasi SDA dan prasarana wilayah dengan anggaran sebesar Rp. 197.081.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 196.742.217,- atau persentase sebesar 99,83%. Dampak kegiatan ini kegiatan yang berkaitan dengan bidang SDA dan Praswil dapat terencana dengan baik. Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Keluaran kegiatan adalah dokumen proposal anggaran DAK Tahun 2017 dan laporan bulanan pelaksanaan Tahun 2017. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. Rp. 96.810.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 93.004.020 atau persentase sebesar 96,07%. Dampak kegiatan ini meningkatnya nilai investasi di bidang keciptakarya di Kabupaten Sinjai. Review RPIJM Kabupaten Sinjai Keluaran kegiatan laporan review penyusunan RPJM keciptakarya beserta program perencanaan jangka menengah Kabupaten Sinjai hasil kegiatan ini review RPJM Kabupaten Sinjai dengan anggaran sebesar Rp. 119.397.000,- dan telah realisasi sebesar Rp. 115.171.123,- atau persentase sebesar 96,48%. Dampak kegiatan ini terciptanya penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sinjai dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sasaran peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musrenbang kegiatan yang mendukung adalah Kegiatan Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS Kabupaten sinjai Merupakan dokumen dan kebijakan yang merupakan dasar dari penyusunan APBD Kabupaten ditargetkan sebesar 2 (dua) dokumen dan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp Rp. 168.157.000,00. Dengan realisasi keuangan sebesar 98,87%. Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan sinkronisasi usulan kecamatan dengan usulan SKPD yang nantinya akan menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten. Kegiatan ini memiliki target 3 (tiga) dokumen yaitu Bidang Sosial, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur yang dapat direalisasikan dengan anggaran Rp.70.311.000,00 dan realisasi keuangan sebesar 100%. Musyawarah perencanaan pembangunan, Musyawarah perencanaan pembangunan Tahun 2017 sebagai wujud fasilitasi daerah untuk memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat

dalam proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Dengan adanya kegiatan ini maka proses perencanaan pembangunan semakin terarah dan didapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan skala prioritas. Selain itu Kegiatan ini bertujuan agar adanya Dokumen rancangan awal yang berdasarkan Permen 54 Tahun 2005 dasar penyusunan dokumen tahunan Kabupaten Sinjai, dengan target kinerja 1 dokumen, dengan anggaran Rp. 137.600.000,- dan realisasi anggaran Rp. 137.600.000 atau sebesar 100%, keluaran dari kegiatan ini menghasilkan Musrenbang RKPD.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan keberhasilan ataupun kegagalan pada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Perangkat Daerah (PD) penunjang di bidang perencanaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Spesifik
- b. Dapat diukur secara obyektif
- c. Menggambarkan hasil
- d. Relevan dengan kondisi yang diukur
- e. Cukup untuk mengukur kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya, perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan realisasi dengan target rencana strategis, perbandingan dengan capaian nasional, perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran, dan efisiensi penggunaan sumber daya.

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Tahun 2017**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan data perencanaan kabupaten dalam aplikasi SIPD	%	90%	90%	100
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	85%	85%	100
Peningkatan Kecamatan yang menjadi kawasan strategi Cepat Tumbuh	Meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh	Kecamatan	0	0	0
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam APBD	%	90%	90%	100

Dari 4 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 100 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2017 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

### 3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja untuk tahun 2017. Pencapaian indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Indikator Tahun 2017**

#### a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Kabupaten dalam Aplikasi SIPD	%	90%	90%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					100%

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan capaian 100 persen

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	2014	2015	2016	2017
Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Kabupaten dalam Aplikasi SIPD	belum ada	60	65	90

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir ini akan nampak jelas perbedaan disebabkan tahun tahun sebelumnya data dalam aplikasi SIPD belum menjadi perhatian, padahal ketersediaan data dan informasi dari aplikasi SIPD sangat dibutuhkan untuk data base semua dokumen pembangunan .

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian ( % )		
			Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian ( 0%)
1.	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Kabupaten dalam Aplikasi SIPD	%	100%	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah indikator ini baru mencapai target tersebut di optimalkan agar ditahun 2017, dan target tersebut merupakan target awal selama priode renstra.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran **meningkatnya kualitas data dan Informasi Perencanaan Pembangunan** ini didukung dengan

adanya Kerjasama dengan Bappeda Propinsi dalam penyerapan kerterisian data, selain itu kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Daerah adalah faktor penentu keberhasilan sasaran startegi yang mendukung indikator kinerja sasaran ini.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **meningkatkan kualitas data dan Informasi Perencanaan Pembangunan** ini adalah sebesar Rp 117.136.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 108,220,000,- atau 93 %.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **meningkatkan kualitas data dan Informasi Perencanaan Pembangunan** ini didukung dengan adanya program Pengembangan data dan Informasi, program pengembangan data informasi statistik daerah yang di dukung oleh kegiatan Pengelolaan Website, dan penyusunan dokumen system informasi pembangunan daerah.

**Tabel 3.4**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Dokumen Perencana	Persentase kesesuaian Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD	%	-	95	100
	Persentase pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Dokumen RKPD	%	80	80	100
	Persentase Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam dokumen RKPD	%	80	80	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					100%

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen .

b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

No.	Indikator Kinerja	Capaian ( % )			
		2014	2015	2016	2017
1	Persentase kesesuaian Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD	-	90%	-	100%
2	Persentase pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Dokumen RKPD	74%	78%	80%	85%
3	Persentase Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya dalam dokumen RKPD	74%	78%	80%	85%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Meningkatnya kualitas Dokumen Perencana** ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, persen pada tahun 2015 meningkat menjadi rata –rata 78% persen menjadi 80% pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 85% sehingga mengalami **Peningkatan kualitas Dokumen Perencana**.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian (%)
1.	Persentase kesesuaian Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD	%	100	100	100
2.	Persentase pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dalam Dokumen RKPD	%	100	79	79
3.	Persentase Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan dalam Dokumen RKPD	%	100	79	79

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka semua indikator yang telah mencapai target jangka menengah dan pencapaian tersebut akan terus dioptimalkan agar ditahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sinjai) target tersebut dapat dicapai.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas Dokumen Perencana** ini adalah keterlibatan tenaga ahli /tenaga pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan tahun ini juga telah dilaksanakan revisi RPJMD dan Revisi Renstra RKPD penyesuaian dengan RPJMN dan RPJMD Propinsi sebagai dokumen induk perencanaan Kabupaten.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas Dokumen Perencana** ini adalah sebesar Rp.2.502.529.100,-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas Dokumen Perencana** ini adalah sebanyak 5 program dan 16 kegiatan, yaitu: **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan 4 kegiatan yaitu: Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten Sinjai, Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Updating system informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) dan Fasilitasi revisi dokumen perencanaan. **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi** sebanyak 1 Kegiatan yaitu: Penyusunan perencanaan pengembangan potensi ekonomi lokal kabupaten sinjai tahun 2017, **Program Perencanaan Sosial Pemerintahan** sebanyak 6 kegiatan yaitu : koordinasi perencanaan pembangunan bidang social dan pemerintahan, fasilitasi penyelenggaraan Pembina kabupaten/kota sehat tahun 2017, fasilitasi percepatan program penanggulangan kemiskinan, perencanaan dan evaluasi pembangunan Kecamatan dan Desa, Penyusunan rencana aksi daerah (RAD-TB), fasilitasi program pengarusutamaan gender (PUG), **Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** sebanyak 3 kegiatan diantaranya koordinasi evaluasi perencanaan ruang daerah (KEPRD) Kabupaten Sinjai, Penyusunan KLHS dokumen perencanaan, review RTRW Provinsi Substansi Kehutanan. **Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar** sebanyak 2 kegiatan yaitu : Updating implementasi pemutahiran strategi sanitasi kabupaten (SSK) Program PPSP, dan Fasilitasi pokja air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS III).

**Tabel. 3.5**

Analisis pencapaian **Sasaran 3 : Peningkatan Kecamatan yang menjadi kawasan strategi Cepat Tumbuh** dapat dijelaskan sebagai

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Kecamatan yang menjadi kawasan strategi	Jumlah Kecamatan yang menjadi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh	Kacamatan	2	-	-

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini di tetapkan targetnya adalah 2 sampai dengan tahun 2017, hanya dilakukan program dan kegiatan pendukung **sasaran 4 Peningkatan Kecamatan yang menjadi kawasan strategi Cepat Tumbuh**, untuk persiapan kecamatan menjadi kawasan strategi cepat tumbuh.

- b. **Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian ( % )		
			2015	2016	2017
1.	Jumlah Kecamatan yang menjadi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh	Kecamatan	-	-	-

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka akan nampak kelihatan tidak ada pencapaian target dari indikator jumlah kecamatan yang menjadi kawasan strategi cepat tumbuh, tetapi ini bukan berarti tidak ada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan strategi yang cepat tumbuh. Melainkan sedang dilakukan persiapan dan koordinasi dalam upaya pembinaan, percepatan, pengawasan terhadap kecamatan-kecamatan yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategi cepat tumbuh.

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian ( 0%)
1.	Jumlah Kecamatan yang menjadi Kawasan Strategi Cepat Tumbuh	Kecamatan	2	-	-

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah belum ada keberhasilan capaian indikator kinerja terhadap jumlah kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh, tetapi program dan kegiatan yang menjadi pendukung sasaran ini tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan kecamatan kecamatan yang menjadi target karena target sampai tahun 2017.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan strategi cepat tumbuh**, ini belum dapat dikatakan berhasil atau mengalami kegagalan karena indikator sasaran belum memiliki target yang dapat diukur kinerjanya tetapi tingkat keberhasilan sasaran ini sangat besar peluangnya mengingat persiapan persiapan, koordinasi, konsultasi.

e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh** ini adalah sebesar Rp. 942.171.600,- dan anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.959.853.017 sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar RP. 822.086.915,- atau sebesar 89 %

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh** ini adalah sebanyak 1 program dan 3 kegiatan, yaitu: **program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh**, dengan 3 kegiatan dan **program Perencanaan Pengembangan kota – kota menengah dan Besar** dengan 2 kegiatan dan **program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA** sebanyak 3 Kegiatan.

Tabel 3.6

## a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam pembiayaan APBD	%	90	90	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					100%

Dari kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, ini telah berhasil memenuhi target yaitu dengan capaian 100 persen.

## b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
	2014	2015	2016	2017
persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam pembiayaan APBD	75%	80%	85%	90%

Jika dilihat capaian kinerja sasaran **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang** tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang** meningkat.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai tahun ini	Capaian (0%)
1.	persentase usulan musrenbang kabupaten yang diakomodir dalam pembiayaan APBD	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 pencapaian target jangka menengah juga sudah dilakukan dengan memenuhi target pada indikator kinerja sasaran dengan pencapaian seluruhnya sebesar 100 persen.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang** ini didukung dengan adanya kelompok perencana yang menjadi fasilitator mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten, pendampingan pokren ( kelompok perencana ) dalam proses musrenbang memberikan andil terhadap kemampuan masyarakat mengusulkan usulan sesuai dengan format yang tersedia.

- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2016 untuk pencapaian sasaran **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang** ini adalah sebesar Rp.376.068.000.- tersebut terealisasi sebesar Rp. 374.162.460,-atau 99,5 persen .

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang** ini adalah **Program perencanaan Pembangunan daerah dengan 3 Kegiatan yaitu** Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD, Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD/PPAS Perubahan dan Kebijakan Umum APBD/PPAS Kabupaten Sinjai. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dari 4 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2017, 6 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tingkat pencapaiannya telah mencapai 100 % pada Tahun 2017, bahkan beberapa target melebihi target tetapi masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ke tujuh (7) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, Bappeda akan mempertahankan atau bahkan meningkatkan apa yang telah mencapai target.

### 3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2017 sebesar 100 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran persasaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Perencanaan Sosial Pemerintahan (97,76 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (89,47 %).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada *tabel berikut* :

**Tabel 3.7**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017**

No.	Sasaran	Program	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas data dan Informasi perencanaan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Data/Informasi</li> <li>• Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</li> </ul>	90	90	100	117.136.000,-	108.220.000,-	93
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>• Program Perencanaan Sosial Pemerintahan</li> </ul>	95	95	100	2.264.061.100-	2.171.568.532,-	95,92

No.	Sasaran	Program	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya kecamatan yang menjadi kawasan cepat tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh.</li> <li>• Program Perencanaan pengembangn kota-kota menengah dan besar.</li> <li>• Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> </ul>	2	-	-	1.776.133.000,-	1.609.389.668,-	90,62
4.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	80	80	100	376.068.000,-	374.162.460,-	99,50

## BAB IV PENUTUP

LKj Bappeda Kabupaten Sinjai ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Bappeda Kabupaten Sinjai ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bintek/workshop;
4. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan;
- b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik;
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Dengan memperhatikan permasalahan, maka dalam pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi seperti diuraikan berikut ini :

- a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD/lembaga dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;
- b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;

- c. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat/bintek/workshop perencanaan.

Tingkat capaian (target) rata-rata sasaran kinerja utama sebesar 85%, dan realisasi rata-rata 85%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 100%.

Demikian penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Sinjai tahun 2017. Semoga dapat memberikan informasi dan mendorong/memotivasi dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance.

Sinjai, 1 Februari 2018  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah



**Dis. Andi Linam Abubakar, MH**

Pembina Tk. I / IV b

Nip. 19720512 199202 1 001